

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinamika yang berkembang antara berbagai pemangku kepentingan global semakin meningkatkan ketegangan di sepanjang wilayah Samudera Hindia dan Pasifik. Kehadiran Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok, telah membuat dinamika regional semakin rumit. Fenomena ini menuntut Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih aktif terhadap setiap potensi yang muncul. Membangun hubungan kerja sama dengan AS dan Tiongkok menjadi suatu keharusan bagi Indonesia. Di satu sisi, kehadiran Tiongkok melalui Jalur Pemulihan Ekonomi (BRI) memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama terkait investasi dalam perbaikan infrastruktur dan industri domestik. Namun, Indonesia menyadari bahwa potensi risiko terhadap stabilitas di Asia Tenggara tidak dapat dihindari.

Bukan tanpa alasan bahwa ketidakstabilan di ASEAN dapat terbentuk, karena kecenderungan setiap negara anggota ASEAN untuk bersikap mendukung AS atau Tiongkok. Kecenderungan untuk berpihak ini mencerminkan terbentuknya kerangka peta politik baru yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan berkelanjutan di ASEAN. Indonesia menyadari urgensi akibat ketidakpastian dalam tatanan regional transisional yang dipicu oleh persaingan hegemoni antara AS dan Tiongkok.

Selain itu juga muncul sejumlah isu, seperti sengketa klaim batas laut, tindak terorisme, imigrasi ilegal, perdagangan narkoba, dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya, yang berkontribusi pada ketidakstabilan keamanan di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, isu-isu tersebut menjadi fokus utama penulis untuk menyelidiki dengan lebih mendalam strategi-strategi yang sesuai untuk mengatasi ketidakstabilan keamanan di Indo-Pasifik,

khususnya melalui peran Indonesia dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Disetujuinya AOIP pada tahun 2019 telah menjadikan kerangka kerja ini sebagai dasar teknis bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerjasama yang sudah berlangsung dan sebagai kemajuan dalam kolaborasi di sektor maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi, baik dengan mitra dialog ASEAN maupun antar anggota. AOIP juga bertujuan untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB tahun 2030 dan Visi ASEAN 2025. ASEAN menyoroti pentingnya mekanisme dialog dan kerja sama sebagai model partisipasi aktor di luar kawasan.

Secara keseluruhan, AOIP merupakan pandangan resmi dari negara-negara ASEAN terhadap konsep Indo-Pasifik. AOIP berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara ASEAN dalam merumuskan arah kerja sama dengan mitra-mitra mereka terkait Indo-Pasifik, serta memberikan tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh konsep Indo-Pasifik yang diadopsi oleh ASEAN.

AOIP merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya Visi GMF belum ada kejelasan namun hal ini terus ditekankan oleh Presiden Joko Widodo akan pentingnya wilayah tersebut hingga pada *ASEAN Chairmanship 2023*. Salah satu hasil yang paling menonjol dari terselenggaranya KTT ASEAN yang ke-43 adalah dengan terumuskannya *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF). Kedepannya, AIPF tentunya diharapkan dapat memaksimalkan potensi investasi di pasar ASEAN yang berpenduduk 680 juta jiwa, dan memanfaatkan pasar Indo-Pasifik secara lebih luas. Kawasan Indo-Pasifik mencakup 58 persen populasi dunia, 45 persen perdagangan global, dan 61 persen PDB global. Oleh karena itu, kerja sama regional dan global melalui mekanisme seperti AIPF sangatlah penting.

Konsep-konsep yang diterapkan seperti konsep Indo-Pasifik, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, diplomasi, *security*, dan kepentingan nasional dalam penelitian ini dioperasionalisasikan untuk ditemukan adanya

konformasi sekaligus elaborasi atas fenomena yang terjadi. Kepentingan nasional Indonesia melalui AOIP telah dibuktikan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang diimplementasikan ke dalam diplomasi dengan negara-negara lain serta *external stakeholders*. Dengan demikian, melalui konsep AOIP yang menjadi titik penting dan krusial dalam kawasan Indo-Pasifik telah menjembatani kepentingan Indonesia baik dalam menghadapi ancaman non-tradisional dan tradisional maupun visi GMF nya secara ekonomi, politik, maritim, dan pertahanan.

Novelty dari penelitian ini tentunya memberikan kontribusi lebih dalam terhadap studi kasus strategi Indonesia melalui ASEAN di kawasan Indo-Pasifik dengan AOIP sebagai landasannya khususnya pada periode jangka waktu 2019 sampai 2023. Dimana pada periode tersebut merupakan waktu terbentuknya AOIP secara resmi dan perkembangan kerangka kerja sepanjang lima tahun kedepan yang diakhiri dengan Indonesia sebagai keketuaan ASEAN tahun 2023 dengan menandakan bahwa peran Indonesia pada *chairmanship* tersebut tentunya memberikan *highlight* utama atas penerapan AOIP di Indo-Pasifik. Sebagai “*regional leader*”, “*peacekeeper*”, “*norm-setter*” dan “*consensus-builder*”, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara *archipelago* yang terletak di pusat jantung Indo-Pasifik.

5.2 Saran

Konstelasi geopolitik yang terjadi di Indo-Pasifik masih belum mereda dan keberadaan AOIP masih tetap dipertanyakan. Meskipun demikian, dalam hal ini, AOIP bertindak sebagai posisi yang menegaskan sentralitas ASEAN di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik, Ketegasan tersebut bukan berarti memihak terhadap salah satu pihak atau dengan pihak lainnya tetapi justru ASEAN harus tetap fokus terhadap posisinya yang bersifat netral yang berlandaskan *peace and prosperity* sesuai dengan yang tertera pada *framework ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Kepentingan Kepemimpinan ASEAN tahun 2023 dalam konteks visi politik luar negeri Indonesia adalah untuk memperkuat peran diplomasi

melalui keterlibatan aktif dalam ASEAN. Dalam dokumen pembangunan nasional dan visi Indonesia tahun 2045, ditegaskan bahwa penguatan tatanan kawasan menjadi fondasi utama bagi peningkatan peran diplomasi Indonesia, baik di tingkat regional maupun global. Sebuah ASEAN yang kokoh dianggap sebagai faktor penting yang dapat membantu Indonesia menjadi kekuatan regional yang signifikan, memungkinkan peran aktif dalam pembentukan dan penetapan norma di kawasan tersebut.

Meskipun perubahan besar secara politik mungkin harus menunggu pemerintahan baru pada tahun 2024, terdapat beberapa gagasan yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. Pertama, Indonesia perlu mengembangkan opsi-opsi strategis di luar ASEAN. Para pembuat kebijakan perlu menerima bahwa ASEAN hanya cocok untuk mencapai tujuan di bidang-bidang yang melibatkan pembangunan kepercayaan dan pembangunan norma. Untuk menghadapi tantangan strategis dan operasional yang mendesak, baik di Laut Tiongkok Selatan, Myanmar, atau titik konflik Indo-Pasifik lainnya seperti Taiwan, Indonesia perlu berinvestasi pada opsi non-ASEAN. Opsi-opsi ini mungkin mencakup pengaturan keamanan minilateral dengan India dan Jepang di Indo-Pasifik, atau dengan Vietnam dan Malaysia di Laut Natuna Utara.

Kedua, Indonesia perlu berinvestasi pada sumber daya strategisnya sendiri, bukan hanya pada kepemimpinan intelektual atau normatif. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk memikirkan kembali cara mengatur pembentukan pertahanannya dan mengembangkan kerangka strategis untuk diplomasi pertahanan. Militer, misalnya, perlu mengambil pilihan sulit dalam mengurangi biaya personel demi melakukan pelatihan dan latihan serta modernisasi teknologi. Diplomasi pertahanan juga harus tidak hanya berfokus pada pengadaan peralatan militer saja, namun lebih berfokus pada pengembangan hubungan strategis di seluruh kawasan.

Penulis berharap bahwa kiranya riset akan strategi Indonesia dalam ASEAN di kawasan Indo-Pasifik melalui AOIP semakin meningkat dan berkembang dengan mengkonstruksikan teori-teori yang ada maupun menciptakan teori yang baru untuk melengkapi penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan. Selain itu dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan proyek yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran Indonesia di Indo-Pasifik. Universitas dan pusat studi memegang peranan penting dalam memperdalam pemahaman masyarakat terhadap *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Dengan demikian, tentunya riset ini dapat memberikan kontribusi terhadap para pembuat kebijakan Indonesia untuk kawasan Indo-Pasifik yang lebih baik.

